

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta Jakarta, Jakarta, 1993.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Ctk. Keempat, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi Konsep, Strategi, Dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah/ Madrasah*, Ctk. Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Edisi Pertama, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005.
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2015.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Djamat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Dwidja Priyatno dan Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori Dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, Dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2020.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Depok, 2017.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Ctk. Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2015.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- H. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Ctk. Pertama, Labhukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kesatu, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Ctk. Kedua, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- K. H. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Edisi Revisi, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Ctk. Kesatu, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Ctk. Kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2013.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Ctk. Kedua, alumni, Bandung, 2012.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2015.
- _____, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Kesatu, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Korupsi Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori Dan Praktek*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Murtir Jeddawi, *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*, Ctk. Kesatu, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Ctk. Ketiga, Edisi Revisi, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Keenam, Amzah, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesepuluh, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2015.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2008.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Implementasi*, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Ctk. Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Russel Butarbutar, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Ctk. Kesatu, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Kesatu, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- _____, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Kencana, Jakarta, 2016.

- Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2020*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2020.
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Ctk, Kelima Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

JURNAL

- Abvianto Syaifulloh, “Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi” *Indonesian Journal Of Criminal Law (Ijocl)*, No. 1, Vol. 1, 2019.
- Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, No. 2, Vol. 3, Desember 2017.
- _____, “Urgensi Dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, No. 1, Vol. 8, Juni 2022.
- _____, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Masalah-Masalah Hukum*, No. 3, Vol. 49, Juli 2020.
- Ade Mahmud, Chepi Ali Firman Z, Husni Syawali, Rizki, dan Weganisa, “Keadilan Substantif Dalam Proses *Aset Recovery* Hasil Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Suara Hukum*, No. 2, Vol. 3, September 2021.
- Ade Paul Lukas, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2, Vol. 10, 2010.
- Agus Riyanto, “Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan” *Petita*, No. 2, Vol. 1, Desember, 2019.
- Ahmad, Hambali Thalib dan Baharuddin Badaru, “Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Journal Of Lex Generalis (JLG)*, No. 1, Vol. 2, Januari 2021.
- Ainurnisa Handayani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU” *Varia Hukum*, No. 2, Vol. 3, Juli 2021.

- Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, dan Abas Mansur Tamam, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam" *Al-Mashlahah*, No. 1, Vol. 8, 2020.
- Anastasia Resti Ermalasari dan Elfridaa Ratnawati, "Perlindungan Hukum Kreditor Preferen Ketika Harta Pailit Debitor Disita Negara Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)" *Ensiklopedia Of Journal*, No. 2, Vol. 6, Januari 2024.
- Andi Sabputera dan Firman Wijaya, "Analisis Eksekusi Pidana Uang Pengganti Pada Korporasi BUMN Yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa (Studi Kasus Mahkamah Agung No. 1964 K /Pid.Sus/2015)", *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1, Vol. 2, 2015.
- Andiani Trialika Putri, Enjang Rohiman, Faisal Ahmad Maulana, dan Deden Najmudin, "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, No. 2, Vol. 1, 2023.
- Andrian Andrian, "Sengketa Kewenangan Dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit Antara Kurator Dengan Kejaksaan Republik Indonesia" *Justisi*, No. 3, Vol. 9, September 2023.
- Anggreany Arief dan Azwad Rachmat Hambali, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewisjde*)" *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, No. 1, Vol. 6, Desember 2023.
- Arie Satria Hadi Pratama, "Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti" *Corruptio*, No. 2, Vol. 1, Desember 2020.
- Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" *Lex Et Societatis*, No. 1, Vol. 3, 2015.
- B.G.M. Widipradnyana Arjaya, "Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor." *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. 4, 2016.
- Baharuddin Badaru dan Siswandi, "Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi" *Journal Of Lex Theory (JLT)*, No. 2, Vol.1, Desember 2020.
- Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia" *Wacana Hukum*, No. 2, Vol. 7, Oktober 2008.
- Basir Rohrohmana, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Hukum PRIORIS*, No. 1, Vol. 6, 2017.
- Bendesa Made Cintia Buana, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata" *Jurnal Rechtsens*, No. 2, Vol. 3, Desember 2014.

- Binto Kusmadi, Ismail, dan Dewi Iryani, "Proteksi Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Proses Kepailitan Terhadap Peninggalkan Debitor Yang Disita Kejaksaan" *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 3, Vol. 12, 2023.
- Budi Suhariyanto, "Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, No. 1, Vol. 7, 2018.
- _____, "Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif "Vicarious Liability" Kajian Putusan Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, No. 1, Vol. 10, April 2017.
- Deny Setiawan Siregar, Madiasa Ablisar, dan Edi Yunara, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, No. 6, Vol. 2, 2023.
- Eko Surya Saputra "Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dekie Gg Kasenda", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, No. 2, Vol. 5, 2020.
- Endang Hadrian, Anggreany Haryani Putri, dan Lukman Hakim, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Hukum Pelita*, No. 2, Vol. 3, November 2022.
- Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No. 2, Vol. 14, 2015.
- Fратиwi Dan Rafiqa Sari, "Dalam Kepailitan Bagi Kreditor Konkuren Di Indonesia" *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, No. 3, Vol. 2, Juni 2023.
- Galih Setyo Rangga dan Sinda Eria Ayuni, "Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum" *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, No. 2, Vol. 13, Oktober 2022.
- Habib Adjie, "Tergerusnya *Droit De Preference* (Asas Prioritas) Kreditor, Ketika Debitor Tersangkut Tindak Pidana Korupsi" *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, No. 2, Vol. 8, November 2019.
- Halimah Humayra Tuanaya, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai *Legal Person* Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, No. 1, Vol. 7, Maret 2017.
- Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia" *Jurnal Hukum Media Bhakti*, No. 2, Vol. 3, Desember 2019.
- Hendrika Beatri dan Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum" *Justitia Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 2, April 2018.

- Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra, “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi” *Journal Of Islamic Law*, No. 2, Vol. 5, 2021.
- Heydi Perdana Santoso dan Ardiansyah, “Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 3, Vol. 6, Oktober 2022.
- Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, dan Fauzah Nur Aksa, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, No. 2, Vol. 4, April 2021.
- I Gede Andi Iswarayana dan I Putu Sudarma Sumadi, “Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.Niagamdn.)” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, No. 11, Vol. 1, 2013.
- Intan Munirah, Mohd. Din, dan Efendi, “Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 19, Agustus 2017.
- Ismaidar, T. Riza Zarzani, dan Askamaini, “Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan” *Jurnal Hukum Progresif*, No. 6, Vol. 7, Juni 2024.
- Ismaidar, T. Riza Zarzani, dan Daniel Edward Hernando Situmorang, “Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Kritis Studi Hukum*, No. 5, Vol. 9, 2024.
- Josua Fernando dan Susanti Adi Nugroho, “Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan” *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1, Vol. 1, 2018.
- Kristwan Genova Damanik, “Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Masalah-Masalah Hukum*, No. 1, Vol. 45, Januari 2016.
- Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, No. 2, Vol.5, 2019.
- Luthvi Febryka Nola, “Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan, *Negara Hukum*, No. 2, Vol. 9, November 2018.
- M Yusuf Daeng, dan Tri Novita Sari Manihuruk, “Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru” *Justitia Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 6, Oktober 2021.
- Maulana Farras dan Elfrida R Gultom, “Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditor Kepada Debitor Pasca Berakhirnya Kepailitan”, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, No. 2, Vol. 6, Juni 2023.

- Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Wawasan Yuridika*, No. 2, Vol. 4, September 2020.
- Muhammad Arif Fauzi, Umi Rozah, dan Bambang Dwi Baskoro, “Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Diponegoro Law Journal*, No. 3, Vol. 5, 2016.
- Muhammad Syarif, Sunarmi, dan Edi Yunara, “Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan” *Locus Journal Of Academic Review*, No. 9, Vol. 2, 2023.
- Mulyadi Alrianto Tajuddin, “Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai *Premium Remedium* Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara” *Jurisprudentie*, No. 2, Vol. 2, Desember 2015.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, “Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti” *Lex Lata*, No. 2, Vol. 1, 2019.
- Nasrah Hasmiati Attas, “Eksekusi Uang Pengganti Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jda : Journal Delik Adpertisi*, No. 1, Vol. 2, Januari 2023.
- Nicky Yehezkiel Singal, Fritje Rumimpunu, dan Grace H. Tampongangoy, “Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga”, *Lex Privatum*, No. 1, Vol. 10, Januari 2022.
- Nur Aripkah, “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 27, Mei 2020.
- Nur Hayati dan Andrea Reynaido, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006)” *Lex Jurnalica*, No.1, Vol. 7, Desember 2009.
- Nur Iqbal Mahfudh, “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, No. 2, Vol. 6, Mei 2017.
- Oktaviani. F. Tambunan, “Penyitaan Benda Dalam Kepailitan Oleh Kurator Dan Penyitaan Benda Oleh Kepolisian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS-PAILIT/2015)” *Jurnal Verstek*, No. 2, Vol. 7.
- Putri Nur Wisudawati, Naila Aulia Rahmah Virhanida, Moh Fadhel Abd Jalil, Muhammad Reza Rijalallah, dan Deden Najmudin, “Analisis Sanksi Tindak Pidana (Jarimah) Dalam Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, No. 1, Vol. 1, 2023.

- Rachmat Ihya, “Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 1, Oktober 2023.
- Rahmawati Yurist Adhia, Siti Mahmudah, dan Edy Sismarwoto, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita *Boedel* Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga Internasional Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015), *Diponegoro Law Journal*, No. 1, Vol. 10, 2021.
- Refhianti Chairanie dan Anita Afriana, “Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya *Boedel* Pailit Oleh Negara” *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, No. 1, Vol. 4, Januari 2021.
- Rena Yulia, “Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?” *Lex Lata*, No. 1, Vol. 2, 2022.
- Ricky Fauzan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aset Sita Umum Pailit Yang Dinyatakan Sebagai Barang Sitaan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)”, *Premise Law Jurnal* 12, 2018.
- Riky Sembiring, “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Aktual Justice*, No. 2, Vol. 3, Desember 2018.
- Rinah Fahma Aulia, Ujang Supian, dan Zaidi Hamzah Alfatih, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta’zir”, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, No. 2, Vol. 1, 2023.
- Rinaldy Amrullah, Maroni, dan Ronaldo Galang Pratama, “Implementasi Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)”, *Jurnal Ilmu Sosial*, No. 1, Vol. 3, 2023.
- Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Kompilasi Hukum*, No. 1, Vol. 5, Juni 2020.
- Rustam, “Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (*Aset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Dimensi*, No. 2, Vol. 6, Agustus 2017.
- Ruswati, “Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit” *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, No. 1, Vol. 2, Maret 2022.
- Ruth Yohana Siburian, Ety Susilowati, dan Budi Ispriyarso, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan” *Diponegoro Law Journal*, No. 1, Vol. 6, 2017.
- Saut Mulatua dan Ferdricka Nggeboe, “Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Legalitas*, No. 1, Vol. 9, 2017.

- Septi Dyah Tirtawati dan Pujiyono, “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia” *Gorontalo Law Review*, No. 1, Vol. 4, April 2021.
- Shiddiq Al Hakimi dan Adlin Budhiawan, “Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara” *Jurnal Preferensi Hukum*, No. 2, Vol. 4, Juli 2023.
- Silvia Kurnia Dewi, “Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang”, *Arena Hukum*, No. 1, Vol. 13, April 2020.
- Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, Vol. 3, 2016.
- Sitti Hajani, Sufirman Rahman, dan Anggreany Arief, “Kedudukan Hukum Barang Bukti Yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana” *Journal Of Lex Generalis (JLG)*, No. 2, Vol. 4, 2023.
- Sri Redjeki Slamet, “Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor” *Forum Ilmiah*, No. 1, Vol. 13, Januari 2016.
- Sufriadi Ishak, “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)”, *Ameena Journal*, No.1, Vol. 1, 2023.
- Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor Dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. 4, Desember 2016.
- Syamsul Anwar, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 15, 2008.
- Talitha Belvarini Candraningrum, “Upaya Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Telah Diputus Pailit” *Jurist-Diction*, No. 2, Vol. 5, 2022.
- Tjokorda Istri Agung Adintya Devi dan I Gusti Ngurah Parwata, “Harta Benda Yang Dapat Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kertha Wicara*, No. 10, Vol. 9, 2020.
- Tobi Haryadi, Rianda Riviyusnita, dan Zakaria, “Efektivitas Penerapan Terhadap Tindak Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, No. 4, Vol. 29, Desember 2023.
- Tofik Yanuar Chandra dan Indik Rusmono, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korups” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, No. 2, Vol. 14, 2020.
- Togi Pangaribuan, “Perkembangan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi” *Law Review*, No. 1, Vol. 19, Juli 2019.

- Ujang Charda S., Fernando Manggala Yudha S, dan Syaefa Wahyuni, “Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia” *Journal Of Social Science Research*, No. 3, Vol. 4, 2024.
- Ulfa Mardhatillah dan Elfrida Ratnawati Gultom, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Amar Diluar Surat Dakwaan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam)”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, No. 4, Vol. 6, Januari 2023.
- Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Journal Of Criminal Law*, No. 1, Vol. 1, 2020.
- Yagie Sagita Putra, “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana” *UBELAJ*, No. 1, Vol. 1, April 2017.
- Yuda Musatajab dan Mulyadi A. Tajuddin, “Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Restorative Justice*, No. 1, Vol. 2, Mei 2018.
- Zaid Alfauza Marpaung, “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* No. 01, Vol. 07, 2019.
- Zul Afiatul Kharisma, Brian Bagus Wiyan Putra, dan Melasari Nurul Hidayah, “Model Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi Oleh BUMN Sebagai Korporasi: Antara Tanggung Jawab Korporasi Dan Pengurus” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 12, Vol. 2, Desember 2021.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/ Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/j.a/11/2001 tanggal 1 November 2001.

Fatwa Mahkamah Agung RI No.37/T4/88/66/Pid Tanggal 12 Januari 1988 Tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti.

SEMA Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Eksekusi Terhadap Pembayaran Uang Pengganti

Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988 Tahun 1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 Perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : 003/A/JA/2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014.

Website

Alfis Setyawan, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, terdapat dalam [PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI RECOVERY KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI \(pn-semarangkota.go.id\)](http://pn-semarangkota.go.id). Diakses pada tanggal 13 Juli 2024.

Asep Nursobah, *vicarious liability*, terdapat dalam [Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

Baso Faisal, *Derden Verzet Terhadap Putusan Pidana, Adakah?* terdapat dalam [Derden Verzet Terhadap Putusan Pidana, Adakah? \(hukumonline.com\)](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 11 Juli 2024.

Erni Herawati, *kreditur preferen dalam KUH Perdata*, terdapat dalam [KREDITUR PREFEREN DALAM KUH PERDATA \(binus.ac.id\)](http://www.binus.ac.id). Diakses pada tanggal 28 Juli 2024.

[Hasil Pencarian - KBBI VI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#). Diakses pada tanggal 11 Maret 2024.

Muhamad Fauzi, *Privilege (hak istimewa)*, terdapat dalam [MUHAMAD FAUZI LAWYERS: Privilege \(Hak Istimewa\)](#). Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2024.

Novrieza Rahmi, *Bila Harta Benda Korporasi Nihil Atau Tak Cukup Membayar Denda*, terdapat dalam [Bila Harta Benda Korporasi Nihil atau Tak Cukup Membayar Denda... \(hukumonline.com\)](#). Diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, terdapat dalam [Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi - LEIP](#). Diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

Rasamala Aritonang, *Memidana Korporasi*, terdapat dalam, [Memidana Korporasi | ICW \(antikorupsi.org\)](#). Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

Shannon Lorelei, *KUHP Series Episode 2: Menggali Perubahan Mendasar Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP Baru*, terdapat dalam [KUHP Series Episode 2: Menggali Perubahan Mendasar Berkaitan dengan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru - LBH "Pengayoman" UNPAR](#). Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.